

# **PENGARUH BELANJA MODAL, INVESTASI, JUMLAH WISATAWAN, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA**

**Dzakiyyah Ulfah Wajaudje<sup>1</sup>, Santi Susanti<sup>2</sup>, & Indra Pahala<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

<sup>2,3</sup> Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

## **Abstrak**

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang diberikan oleh Belanja Modal, Investasi, Jumlah Wisatawan, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Objek dalam penelitian ini adalah Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 hingga 2016. Data pada penelitian merupakan data kuantitatif yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.

Hasil analisis menggambarkan, Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan peningkatan dalam belanja modal pengadaan fasilitas-fasilitas umum dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi. Investasi tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan pajak untuk penanam modal dalam negeri lebih tinggi dibandingkan dengan penanam modal asing sehingga menjadi pertimbangan investor dalam negeri dalam menanamkan modal. Jumlah Wisatawan memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan berbagai sektor pariwisata menarik yang mendukung wisatawan untuk berkunjung ke Provinsi DKI Jakarta. Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan peningkatan pertumbuhan ekonomi Jakarta yang didominasi oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan perdagangan hotel dan restoran yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi. Secara simultan, Belanja Modal, Investasi, Jumlah Wisatawan, dan Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

**Kata kunci:** pendapatan asli daerah, belanja modal, investasi, jumlah wisatawan, pertumbuhan ekonomi

## **PENDAHULUAN**

Menurut Hasanah dan Fauzi (2016), akuntansi pemerintahan adalah aktivitas dengan memberikan jasa dalam menyediakan informasi keuangan pemerintah yang didasarkan

pada proses pencatatan, pengikhtisaran, pengklasifikasian, dalam transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut. Dalam menyusun laporan keuangan, pemerintah memiliki standar dalam penyusunannya, yakni Standar Akuntansi Pemerintahan atau

SAP. Standar Akuntansi Keuangan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang didalamnya menjelaskan komponen-komponen laporan keuangan pemerintah, meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Menurut Koswara (2000) ciri utama yang menunjukkan bahwa suatu daerah dapat dikatakan mandiri dilihat dari kemampuan keuangan daerahnya, dimana pemerintah daerah memiliki wewenang serta kemampuan dalam menggali sumber keuangan sendiri, mengelola, dan memanfaatkannya untuk membiayai penyelenggaraan penerimaan daerahnya. Menurut Nurcholis (2007) sumber keuangan daerah yang utama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu faktor dalam terciptanya otonomi daerah yang mandiri dalam meningkatkan sumber-sumber penerimaan dengan mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Dengan adanya peningkatan PAD maka daerah tersebut akan semakin mandiri sehingga dapat mengambil keputusan dan membuat kebijakan pembangunan (Sari, 2013). Data pendapatan asli daerah DKI Jakarta tahun 2007-2016 yang diperoleh dari data keuangan daerah pada web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tampak pada gambar 1.

Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai indikator tingkat kemandirian suatu daerah. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa PAD DKI Jakarta selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Hal ini berarti tingkat ketergantungan Provinsi DKI Jakarta kepada pemerintah pusat berkurang setiap tahunnya. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan agar mengetahui hal-hal yang memengaruhi peningkatan PAD DKI Jakarta. Data keuangan daerah pada web Direktorat Jenderal Perimbangan



**Gambar 1**  
Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta (2007 – 2016)

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Keuangan menunjukkan bahwa daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah tertinggi di Indonesia adalah DKI Jakarta.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan penanaman modal asing (PMA) terbesar pada hotel berbintang sebesar 56 persen. Pada bulan Januari-September 2016 dari total investasi pariwisata senilai 594,59 juta dollar Amerika Serikat (AS), sektor perhotelan mencapai 333 juta dollar AS. Investasi tersebut didominasi oleh Singapura sebesar 51 persen. Sedangkan British Virgin Islands sebesar 14 persen, dan Luxemburg sebesar 8 persen. Hal ini berarti realisasi investasi pada sektor pariwisata meningkat 23 persen dibandingkan tahun 2015 sebesar 1.094 juta dollar AS. Sementara penanaman modal dalam negeri (PMDN) Januari-September 2016 sebesar 139,06 juta dollar AS dengan sektor perhotelan yang didominasi diminati investor dalam negeri. Dengan rincian, untuk hotel berbintang sebesar 65 persen, wisata tirta 21 persen, kegiatan taman bertema/hiburan 4 persen (Kompas, 2016).

Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan DKI Jakarta mengatakan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2013 dari sektor pariwisata mengalami peningkatan sebesar 60 persen bila dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Jumlah kunjungan wisatawan domestik DKI Jakarta tahun 2013 mencapai 31.646.700 orang, yakni meningkat 9,12 persen dibanding tahun sebelumnya sebanyak 28.800.000 orang (Kompas, 2014).

Belanja modal suatu daerah menjadi salah satu indikator dalam mensejahterakan masyarakatnya. Melalui peningkatan prasarana yang dibangun oleh pemerintah yang bermanfaat untuk masyarakat maka masyarakat akan menikmatinya dengan nyaman dan rela membayar retribusi atas

fasilitas yang dinikmati tersebut. Sehingga melalui peningkatan kualitas layanan publik tersebut maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Datu dalam Ririn, Prihatni, dan Murdayanti, 2014).

Dalam meningkatkan prasarana publik untuk masyarakat tentu membutuhkan modal yang besar maka dapat memanfaatkan potensi daerah dalam menarik investor yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Kemampuan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan kebijakan yang berkaitan dengan investasi, salah satunya bergantung pada kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan (Utami, 2013).

Melalui prasarana publik yang telah dibangun sehingga menciptakan tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi seperti Provinsi DKI Jakarta adalah ibukota negara Indonesia yang memiliki tempat bersejarah serta tempat wisata menarik melalui sektor pariwisata yang dapat menjadi daya tarik wisatawan.

Sektor penting dalam membangun dan mengembangkan suatu wilayah adalah sektor pariwisata, karena sektor pariwisata dapat menambah pendapatan daerah serta mensejahterakan masyarakat (Suartini, dan Utama, 2013). Proses perkembangan sektor pariwisata sangat dipengaruhi oleh jumlah kunjungan wisatawan. Dengan proses perkembangan sektor pariwisata maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Wijaya, dan Djayastra, 2014). Hal ini dikarenakan jika para wisatawan berwisata disuatu daerah maka akan memerlukan barang dan jasa dalam memenuhi kegiatan konsumtif wisatawan. Sehingga proses pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat (Widyaningsih, dan Budhi, 2014). Dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Wulandari, dan Ayuningsasi, 2014).

Belanja modal merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan pendapatan asli suatu daerah. Darwanis dan Saputra (2014) menyebutkan pada penelitiannya ada pengaruh positif belanja modal terhadap PAD yang disebabkan oleh adanya peningkatan pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah daerah maka masyarakat dapat menikmati untuk menjalankan produktivitas pekerjaannya sehingga masyarakat akan membayar pajak dan retribusi dalam menikmati infrastruktur yang akan meningkatkan PAD.

Namun belanja modal berpengaruh negatif terhadap PAD dalam penelitian Ristani, Darmawan, dan Anantawikrama (2015) yang disebabkan oleh pemanfaatan alokasi belanja modal dalam hal pelayanan publik maupun dalam meningkatkan pariwisata yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kabupaten Bangli belum maksimal.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dapat dipengaruhi oleh investasi, seperti pada penelitian Wulandari dan Ayuningsasi (2014) adanya pengaruh positif Investasi terhadap PAD, disebabkan oleh Provinsi Bali yang dikenal dengan sektor pariwisatanya yang menarik sehingga menarik wisatawan untuk menikmati daerah tersebut, sehingga meningkatkan perekonomian yang berdampak pada bertambahnya jumlah investasi serta meningkatkan PAD Provinsi Bali.

Sementara itu, pada penelitian Utami (2013) yang menjelaskan bahwa investasi berpengaruh negatif terhadap PAD yang disebabkan oleh kemampuan keuangan daerah di Kota Tasikmalaya, karena tidak setiap tahun menyertakan modalnya berupa investasi kepada Bank Jabar Banten melainkan bergantung pada kebijakan kepala daerah tersebut. Dengan minimnya penyertaan modal maka tidak dapat

memberikan kontribusi yang maksimal untuk PAD.

Terdapat pula penelitian yang meneliti jumlah wisatawan dapat memengaruhi pendapatan asli daerah (PAD). Suartini dan Utama (2013) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif antara jumlah wisatawan terhadap PAD. Pengaruh positif tersebut disebabkan oleh potensi adat istiadat dan kesenian di Kabupaten Gianyar yang dapat diandalkan sehingga meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Gianyar.

Sedangkan dalam penelitian Purwanti dan Dewi (2014) menjelaskan pengaruh negatif antara jumlah wisatawan terhadap PAD dimana pengaruh negatif tersebut disebabkan oleh kawasan wisata pacet yang dilanda hujan deras yang menimbulkan banjir bandang dan pengelolaan objek wisata Museum Trowulan yang kurang baik sehingga menyebabkan menurunnya jumlah wisatawan di Kota Mojokerto.

Kemajuan suatu daerah tentu dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerahnya karena dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013) menjabarkan bahwa produk domestik regional bruto (PDRB) memiliki pengaruh positif terhadap PAD. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya hotel dan restoran di Provinsi Bali yang merupakan sektor terbesar dalam memberikan kontribusi terbesar dalam meningkatkan PDRB.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka terdapat perbedaan hasil dalam penelitian terdahulu. Belanja modal memiliki pengaruh yang berbeda terhadap PAD pada penelitian terdahulu dimana dalam penelitian (Darwanis dan Saputra, 2014) menjelaskan terdapat pengaruh positif, sedangkan belanja modal berpengaruh negatif pada penelitian (Ristani, Darmawan, dan Anantawikrama, 2015).

Selain belanja modal terdapat faktor lain yang memengaruhi PAD yakni investasi yang pada penelitian terdahulu adanya pengaruh positif antara investasi terhadap PAD pada penelitian (Wulandari dan Ayuningsari, 2014), sedangkan dalam penelitian (Utami, 2013) menjelaskan bahwa investasi berpengaruh negatif terhadap PAD.

Adapun penelitian yang meneliti pengaruh jumlah wisatawan terhadap PAD dalam penelitian (Suartini, dan Utama, 2013) dengan hasil pengaruh positif jumlah wisatawan terhadap PAD, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purwanti, dan Dewi, 2014) yang dijelaskan pada penelitiannya dengan hasil pengaruh negatif jumlah wisatawan terhadap PAD. Serta adapun pengaruh produk domestik regional bruto terhadap PAD dengan hasil pengaruh positif dalam penelitian (Sari, 2013).

Dengan adanya perbedaan pendapat pada penelitian terdahulu maka pemerintah daerah harus mengelola keuangan daerahnya dengan maksimal dalam melaksanakan otonomi daerah. Melalui pengelolaan tersebut tentu memerlukan informasi mengenai potensi PAD yang dimiliki oleh daerah tersebut, maka perlu adanya penelitian terdahulu untuk mengetahui variabel-variabel yang dapat memengaruhi PAD (Suartini, dan Utama, 2013).

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah Belanja Modal berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta?
2. Apakah Investasi berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta?
3. Apakah Jumlah Wisatawan berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta?

4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta?

### **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoretis

Agar dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam hal yang berkaitan dengan Belanja Modal, Investasi, Jumlah Wisatawan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Manfaat praktis

Dapat menjadikan bahan masukan bagi para pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan dalam meningkatkan realisasi Belanja Modal, Investasi, Jumlah Wisatawan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta.

### **KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **Teori Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Hasanah dan Fauzi (2016), akuntansi pemerintahan adalah aktivitas dengan memberikan jasa dalam menyediakan informasi keuangan pemerintah yang didasarkan pada proses pencatatan, pengikhtisaran, pengklasifikasian, dalam transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut. Nordiawan, Putra, dan Rahmawati (2012) juga mendefinisikan akuntansi pemerintahan menghususkan dalam proses pencatatan serta pelaporan pada transaksi-transaksi yang terjadi pada badan pemerintah. Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yakni pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan.

Dalam menyusun laporan keuangan, pemerintah memiliki standar dalam penyusunannya, yakni Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP yakni prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang didalamnya menjelaskan komponen-komponen laporan keuangan pemerintah, meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

### **Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**

Menurut Hasanah dan Fauzi (2016) dalam memenuhi kebutuhan pemerintah dalam menyusun pelaporan keuangan maka diperlukannya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dibentuk oleh komite SAP. Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri atas sebuah kerangka konseptual dalam 12 pernyataan, yaitu:

1. PSAP 01: Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAP 02: Laporan Realisasi Anggaran
3. PSAP 03: Laporan Arus Kas
4. PSAP 04: Catatan atas Laporan Keuangan
5. PSAP 05: Akuntansi Persediaan
6. PSAP 06: Akuntansi Investasi
7. PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap
8. PSAP 08: Akuntansi Konstruksi dalam pengerjaan
9. PSAP 09: Akuntansi Kewajiban
10. PSAP 10: Koreksi Kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi
11. PSAP 11: Laporan Keuangan Konsolidasian
12. PSAP 12: Laporan Operasional

Freeman (dalam Hamzah dan Kustiani, 2014) terdapat perbedaan karakteristik lingkungan akuntansi komersial dan akuntansi pemerintah Dalam hal perannya dalam perekonomian suatu negara, entitas pemerintah memiliki banyak kesamaan dengan entitas bisnis dalam hal sebagai berikut:

- a. Entitas bisnis mendapatkan modal dari investor yang bertujuan mendapatkan hasil (return) dari investasinya. Maka operasi perusahaan swasta harus mendapatkan profit sebesar-besarnya sehingga mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan, dapat memberikan hasil berupa dividen kepada para investor dan dapat menahan sebagian pendapatannya untuk pengembangan perusahaan di masa yang akan datang. Oleh karena itu operasi entitas bisnis beroperasi dari tahun ke tahun untuk meningkatkan sumber daya ekonomi perusahaan sehingga ukuran perusahaan dalam ukuran manfaat ekonomi juga akan semakin besar.
- b. Tujuan organisasi bisnis tersebut di atas jauh berbeda dengan tujuan pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat sepanjang sumber daya keuangan mencukupi untuk itu. Oleh karena itu pemerintah beroperasi dengan dasar tahun ke tahun, artinya pemerintah mengumpulkan pendapatan yang mencukupi untuk menyediakan layanan kepada masyarakat pada periode tersebut dan tidak berupaya untuk meningkatkan ukuran pemerintah jika diukur dari besarnya sumber daya ekonomi yang dikuasai. Bahkan jika pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode tidak mencukupi untuk menyediakan pelayanan kepada publik, pemerintah dapat memenuhi kekurangannya dengan membentuk utang.

Secara khusus dalam kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), komite SAP telah mengidentifikasi ciri-ciri khusus pemerintah Indonesia yang akan memengaruhi praktik akuntansinya (Hamzah dan Kustiani, 2014), yaitu:

1. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan
  - a. Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan
  - b. Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah
  - c. Adanya pengaruh proses politik
  - d. Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah
  - e. Efisiensi pelayanan yang diberikan dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan dengan monopoli pelayanan oleh pemerintah.
  - f. Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah adalah relatif sulit.
2. Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian
  - a. Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian.

Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif mengenai belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan dan pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.
  - b. Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan.

Investasi pemerintah dalam aset tetap tidak sama dengan investasi yang dilakukan oleh entitas bisnis, dimana manfaat ekonomi dari investasi pemerintah dalam aset tetap tidak akan langsung dinikmati pemerintah dalam bentuk hasil imbal investasi namun kadang-kadang dapat berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan potensi penerimaan pajak dimasa yang akan datang.

- c. Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian.

Prinsip akuntansi dana yang digunakan oleh negara maju yang membatasi penggunaan dana untuk keperluan tertentu dapat diterapkan dalam akuntansi pemerintahan dengan penyesuaian tertentu. Untuk pemerintah saat ini menggunakan sistem dana tunggal dalam membiayai seluruh jenis belanjanya.

### **Keuangan Daerah**

Menurut Koswara (2000) ciri utama yang menunjukkan bahwa suatu daerah dapat dikatakan mandiri dilihat dari kemampuan keuangan daerahnya, dimana pemerintah daerah memiliki wewenang serta kemampuan dalam menggali sumber keuangan sendiri, mengelola, dan memanfaatkannya untuk membiayai penyelenggaraan penerimaan daerahnya.

Keuangan daerah (Baldrick, 2017) yang dinyatakan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yakni semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang dimana didalamnya segala bentuk yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Hak yang dimaksud adalah hak daerah dalam mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi atau sumber penerimaan

lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah kewajiban daerah dalam mengeluarkan uang dalam melaksanakan segala urusan pemerintahan di daerah tersebut.

Dalam menyusun keuangan daerah (Baldrice, 2017) tentu diperlukan siklus anggaran daerah dimana dalam pemerintahan daerah siklus anggarannya adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Siklus APBD meliputi penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menurut Nurcholis (2007), sumber keuangan daerah yang utama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana definisi PAD dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 (18) pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah. Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam menggali dan mengelola sumber-sumber yang dapat meningkatkan penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Adapun klasifikasi pendapatan pajak daerah (Baldrice, 2017) antara lain Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pendapatan Pajak Air Permukaan, Pendapatan Pajak Rokok, Pendapatan Pajak Hotel, Pendapatan Pajak

Restoran, Pendapatan Pajak Hiburan, Pendapatan Pajak Reklame, Pendapatan Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan Pajak Parkir, Pendapatan Pajak Air Tanah, Pendapatan Pajak Burung Walet, Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Klasifikasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dimana jenis pendapatan ini berbentuk dividen yakni bagian laba yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Ada tiga ciri jenis dalam penerimaan deviden, yakni dividen atas penyertaan modal pada BUMD, BUMN, dan perusahaan swasta.

Klasifikasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah, yakni hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan yakni penerimaan pendapatan yang bersumber dari penjualan aset tetap. Aset tetap yang dimaksud adalah aset tetap yang dapat dijual pemerintah daerah yang meliputi penjualan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta penjualan untuk aset tetap lainnya.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 13, menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Dan berdasarkan Pasal 1 ayat (18), menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Yani (2013) dalam bukunya yang berjudul *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, menjelaskan bahwa seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah yang dibedakan menjadi empat jenis pendapatan antara lain pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hal ini bertujuan agar daerah dapat menjalankan otonomi daerah dengan menggali sumber pendanaan sehingga dapat mewujudkan asas desentralisasi disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.

### **Belanja Modal**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan dalam rangka pembelian atau pengadaan aset tetap berwujud dan mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan.

Menurut Mardiasmo (2002) dalam bukunya yang berjudul *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, menyatakan bahwa belanja modal adalah seluruh belanja pemerintah daerah yang mencakup dua jenis belanja yakni bagian belanja aparatur daerah dan pelayanan yang akan meningkatkan aset atau kekayaan daerah seperti biaya pemeliharaan pada kelompok administrasi umum yang bagian dari belanja yang bersifat rutin dimana manfaatnya melebihi satu anggaran.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Data belanja modal menggunakan laporan realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta dalam pos belanja modal dari tahun 2007-2016 per-triwulan (4 triwulan/tahun) sehingga data belanja modal sebanyak 40 data.

### **Investasi**

Menurut Machmud dalam buku *Perekonomian Indonesia (2016)*, peraturan perundang-undangan tentang investasi telah diberlakukan sejak tahun 1967, dimana peraturan tersebut memisahkan dua peraturan investasi yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kemudian kedua undang-undang tersebut diperbaharui menjadi Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Peran investasi dalam memperlancar pembangunan sehingga perlu dimaksimalkan pengelolaan investasi tersebut (Sari, 2013). Dalam meningkatkan pembangunan tentu pemerintah daerah tidak hanya memanfaatkan pada pajak dan retribusi yang

dibayarkan oleh masyarakat tetapi juga harus memikirkan cara lain melalui pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki agar menarik pengusaha agar berinvestasi di daerah tersebut (Ririn, Prihatni, dan Murdayanti, 2014). Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 juga menjelaskan mengenai jenis-jenis investasi yang dibedakan menjadi dua, yakni Penanaman Modal Dalam Negeri; dan Penanaman Modal Asing. Data investasi menggunakan laporan realisasi investasi PMA dan PMDN di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2007-2016 per-triwulan (4 triwulan/tahun) sehingga data investasi sebanyak 40 data.

### **Jumlah Kunjungan Wisatawan**

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 1 mendefinisikan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sedangkan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

Suartini (2013) mengatakan bahwa berdasarkan definisi pariwisata tersebut maka adanya perkembangan dalam pariwisata dilihat dari indikator pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan. Jumlah kunjungan wisatawan adalah jumlah orang yang berkunjung ke tempat wisata. Definisi wisata dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan

daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Karena daya tarik wisatawan untuk berkunjung yang akan meningkatkan pendapatan pada sektor pariwisata. Data jumlah kunjungan wisatawan menggunakan laporan pariwisata Provinsi DKI Jakarta dalam pos jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2007-2016 per-triwulan (4 triwulan/tahun) sehingga data jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 40 data.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi hasil dari kinerja pemerintah daerah untuk kesejahteraan semua masyarakatnya. Sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan di suatu daerah menjadi tujuan utama dalam membangun suatu daerah (Desmawati, Zamzami, dan Zulgani, 2015).

Dalam mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah berkaitan dengan produksi barang dan jasa, dimana jika mengetahui pertumbuhan ekonomi maka akan mengetahui pula kondisi ekonomi dari daerah tersebut. Hal tersebut dapat diukur dengan besaran dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Jaya, dan Widanta, 2014). Data pertumbuhan ekonomi menggunakan laporan pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta dalam pos produk domestik regional bruto (PDRB) dari tahun 2007-2016 per-triwulan (4 triwulan/tahun) sehingga data pertumbuhan ekonomi sebanyak 40 data.

### **Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta**

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Novita, Suharno, dan

Widarno (2016) belanja modal dapat memengaruhi PAD melalui pengelolaan pembangunan di daerah dalam memberikan fasilitas untuk masyarakat sehingga masyarakat akan membayar pajak dan retribusi. Penjelasan ini juga sesuai dengan penelitian Darwanis dan Saputra (2014) dimana pembangunan infrastruktur yang dibuat untuk publik yang akan meningkatkan PAD melalui retribusi dan pajak. Sehingga pelayanan publik yang tinggi akan meningkatkan PAD. Maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

- **H1:** Belanja Modal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

### **Investasi dan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta**

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ririn, Prihatni, dan Murdayanti (2014) dalam meningkatkan investasi sebagai modal pembangunan daerahnya, pemerintah daerah dapat mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki yang dapat menarik investor dalam menanam modal di daerah tersebut. Hal ini selaras dengan penelitian Wulandari dan Ayunungsari (2014) dengan adanya peningkatan investasi maka akan mendukung sektor pariwisata yang akan menggerakkan sektor ekonomi lainnya seperti penginapan, kerajinan, dan lainnya sehingga PAD pun meningkat. Sehingga dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam akan meningkatkan PAD. Maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

- **H2:** Investasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

### **Jumlah Wisatawan dan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta**

Suartini dan Utama (2013) jumlah wisatawan menjadi faktor utama dalam peningkatan sektor pariwisata yang akan memengaruhi PAD melalui pajak

hiburan dan hotel. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Djayastra (2014) sektor pariwisata terukur peningkatannya melalui jumlah wisatawan yang berkunjung. Sehingga dengan semakin banyak jumlah kunjungan wisatawan maka akan meningkatkan perkembangan pariwisata sehingga PAD pun meningkat. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- **H3:** Jumlah Wisatawan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

### **Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta**

Berdasarkan penelitian Pamungkas (2013) dalam mengukur pertumbuhan ekonomi dilihat dari produk domestik regional bruto (PDRB) yakni untuk mengetahui peningkatan produksi barang dan jasa. Hal ini selaras dengan penelitian Sari (2013) pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat melalui produk domestik regional bruto dengan meningkatnya perdagangan hotel dan restoran. Peningkatan ini akan memengaruhi PAD melalui penerimaan pajak daerah dan retribusi. Sehingga peningkatan produksi barang dan jasa di daerah akan memengaruhi PAD. Maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

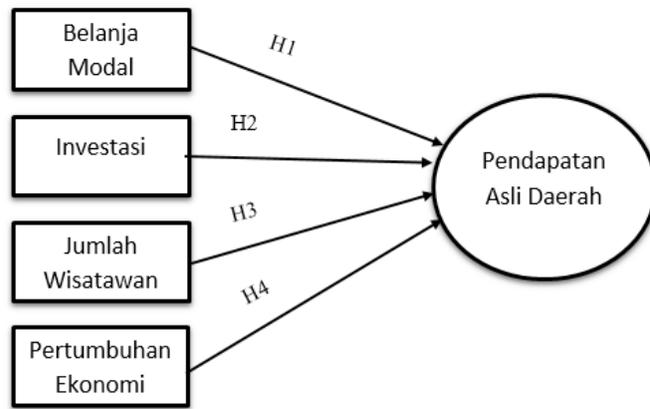
- **H4:** Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

### **POPULASI DAN SAMPEL**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Provinsi DKI Jakarta pada periode 2007-2016, dengan sumber data yang berbeda dari masing-masing variabel. Sedangkan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2013: 122) yang dimaksud dengan *purposive sampling*

adalah teknik penentuan sampel dengan memenuhi kriteria tertentu. Sampel yang digunakan ada empat kriteria yang ditetapkan yaitu:

1. Data belanja modal menggunakan laporan realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta dalam pos belanja modal dari tahun 2007-2016 per-triwulan (4 triwulan/tahun) sehingga data belanja modal sebanyak 40 data.
2. Data investasi menggunakan laporan realisasi investasi PMA dan PMDN di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2007-2016 per-triwulan (4 triwulan/tahun) sehingga data investasi sebanyak 40 data.
3. Data jumlah kunjungan wisatawan menggunakan laporan pariwisata Provinsi DKI Jakarta dalam pos jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2007-2016 per-triwulan (4 triwulan/tahun) sehingga data jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 40 data.
4. Data pertumbuhan ekonomi menggunakan laporan pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta dalam pos produk domestik regional bruto (PDRB) dari tahun 2007-2016 per-triwulan (4 triwulan/tahun) sehingga data pertumbuhan ekonomi sebanyak 40 data.
5. Data pendapatan asli daerah (PAD) menggunakan laporan realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta dalam pos PAD dari tahun 2007-2016 per-triwulan (4 triwulan/tahun) sehingga data PAD sebanyak 40 data.



Gambar 2  
Kerangka Pemikiran

**TEKNIK ANALISIS DATA**

Dalam penelitian ini melakukan pengujian dengan menggunakan uji hipotesis yang meliputi uji F dan uji t, serta uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan *software* khusus yaitu aplikasi *Statistical Package for the Social Science* (SPSS).

Model analisis regresi berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Menurut Ghozali (2013) menyatakan bahwa data yang tidak terdistribusi dengan normal maka dapat ditransformasikan menjadi normal. Sehingga untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen digunakan regresi logaritma natural, yang mana regresi sampelnya adalah:

$$\ln Y = \alpha + b \ln X_1 + b \ln X_2 + b \ln X_3 + b \ln X_4 + e_i$$

Di mana:

Y = variabel dependen  
(Pendapatan Asli Daerah)

$\alpha$  = konstanta

**Model Empiris dan Pengukuran Variabel**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap kerangka penelitian ini, gambaran kerangka teoritik (kerangka pemikiran) adalah sebagai berikut:

- $b_1$  = koefisien regresi  $X_1$
- $\ln X_1$  = Belanja Modal
- $b_2$  = koefisien regresi  $X_2$
- $\ln X_2$  = Investasi
- $b_3$  = koefisien regresi  $X_3$
- $\ln X_3$  = Jumlah Wisatawan
- $b_4$  = koefisien regresi  $X_4$
- $\ln X_4$  = Pertumbuhan Ekonomi
- $e_i$  = tingkat gangguan (*disturbance*)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

Hasil perhitungan analisis statistik deskriptif yang meliputi *mean*, *maximum*, *minimum*, dan *standard deviation* sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Modal (X1)	40	19,291	30,026	28,116	2,156
Investasi (X2)	40	15,150	17,999	16,922	0,825
Jumlah Wisatawan (X3)	40	12,540	13,505	13,081	0,244
Pertumbuhan Ekonomi (X4)	40	25,109	26,712	25,650	0,562
Pendapatan Asli Daerah (Y)	40	28,347	31,239	30,251	0,674
Valid N (listwise)	40				

Sumber: IBM SPSS *Statistics 22*. Data diolah oleh penulis

Pada tabel 1 menggambarkan bahwa variabel pendapatan asli daerah nilai minimum sebesar 28,347 dimana nilai tersebut berada pada Triwulan I tahun 2007. Sedangkan nilai maksimum sebesar 31,239 yang berada pada Triwulan IV tahun 2016. Nilai rata-rata yang dimiliki variabel PAD sebesar 30,251 dengan standar deviasi yang dimiliki sebesar 0,674.

Variabel belanja modal sebesar 19,291 yang berada pada Triwulan I 2014, sedangkan nilai maksimum sebesar 30,026 dimana berada pada Triwulan IV 2016. Nilai rata-rata yang dimiliki variabel belanja modal sebesar 28,116, dengan standar deviasi sebesar 2,156.

Variabel investasi sebesar 15,150 yang berada pada Triwulan IV 2007. Sedangkan nilai maksimum variabel investasi sebesar 17,999 yang berada pada Triwulan IV 2016. Nilai rata-rata yang dimiliki variabel investasi sebesar 16,922 dengan standar deviasi sebesar 0,825.

Variabel jumlah wisatawan sebesar 12,540 yang berada pada Triwulan I 2007, sedangkan nilai maksimum variabel ini sebesar 13,505 yang berada pada Triwulan III 2016. Nilai rata-rata variabel jumlah wisatawan sebesar 13,081, sedangkan standar deviasi yang dimiliki sebesar 0,244.

Variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 25,109 yang berada pada Triwulan I 2007. Sedangkan nilai maksimum variabel ini sebesar 26,712 yang berada pada Triwulan IV 2016. Nilai rata-rata variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 25,650, dengan standar deviasi sebesar 0,562.

► **Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui dan memastikan data penelitian dapat layak untuk dijadikan model regresi.

► **Uji Normalitas**

Hasil uji normalitas yang diperoleh digambarkan dalam adalah sebagai berikut:

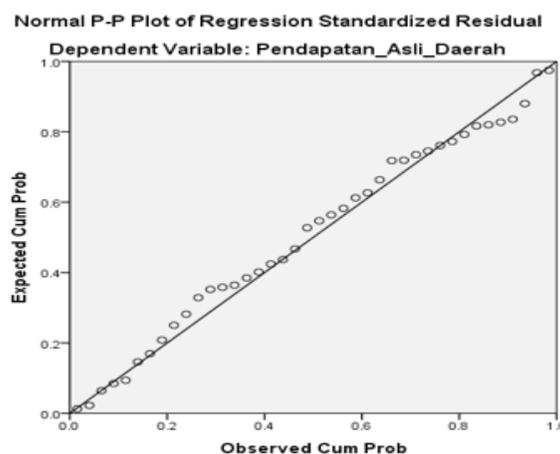
**Tabel 2**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters <sup>a, b</sup>	Mean	0,000
	Std. Deviation	0,257
Most Extreme Differences	Absolute	0,079
	Positive	0,076
	Negative	-0,079
Test Statistic		0,079
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 <sup>c, d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: IBM SPSS *Statistics* 22. Data diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel 2 maka dapat diketahui nilai probabilitas sebesar 0.200 lebih besar dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa data yang diuji berdistribusi normal, serta distribusi data juga digambarkan dengan gambar 3 sebagai berikut:



**Gambar 3**

Grafik Uji Normalitas

Sumber: IBM SPSS *Statistivs* 2. Data diolah penulis

► **Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antar variabel independen dalam regresi berganda (Widarjono, 2015: 59). Hasil uji multikolinieritas yang diperoleh adalah sebagai berikut:

**Tabel 3**  
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	1 (Constant)	-6,340	3,940				-1,609
Belanja_Modal (X1)	0,045	0,021	0,145	2,102	0,043	0,877	1,140
Investasi (X2)	-0,058	0,130	-0,071	-0,444	0,660	0,163	6,132
Jumlah_Wisatawan (X3)	2,258	0,386	0,819	5,847	0,000	0,211	4,730
Pertumbuhan_Ekonomi (Y)	0,264	0,125	0,220	2,101	0,043	0,379	2,639

a. Dependent Variable: Pendapatan\_Aslil\_Daerah  
Sumber: IBM SPSS Statistics 22. Data diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel 3 di atas menjelaskan bahwa variabel independen memiliki nilai *variance inflation factor* (VIF) < 10,00. Maka dapat disimpulkan bahwa keempat variabel independen tidak terjadi masalah multikolinieritas.

► **Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians dari satu pengamatan lain dalam model regresi (Suartini, dan Utama, 2013). Hasil uji heteroskedastisitas yang diperoleh adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**  
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,576	2,184		0,721	0,475
Belanja_Modal (X1)	-0,002	0,012	-0,031	-0,183	0,856
Investasi (X2)	-0,035	0,072	-0,191	-0,491	0,627
Jumlah_Wisatawan (X3)	-0,223	0,214	-0,356	-1,042	0,304
Pertumbuhan_Ekonomi (Y)	0,086	0,070	0,316	1,237	0,224

a. Dependent Variable: RES2  
Sumber: IBM SPSS Statistics 22. Data diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel 4 menggambarkan nilai signifikan untuk masing-masing variabel independen memiliki nilai lebih dari 0,05. Maka berdasarkan hasil tersebut menyimpulkan bahwa empat variabel independen tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

► **Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi adalah hubungan linier antara variabel gangguan satu observasi dengan variabel gangguan observasi lain (Widarjono, 2015: 78). Hasil uji autokorelasi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,925 <sup>a</sup>	0,855	0,838	0,271	1,755

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan\_Ekonomi, Belanja\_Modal, Jumlah\_Wisatawan, Investasi

b. Dependent Variable: Pendapatan\_Asli\_Daerah

Sumber: IBM SPSS Statistics 22. Data diolah oleh penulis

Nilai tabel Durbin-Watson pada penelitian ini dengan batas bawah (dl) sebesar 1,2848 dan batas atas (du) sebesar 1,7209. Pada tabel 4.5 di atas menunjukkan nilai DW hitung sebesar 1,7550 lebih besar dari du sebesar 1,7209 dan lebih kecil dari 4-du sebesar 2,2791. Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini tidak terjadi masalah autokorelasi.

► **Uji Hipotesis**

Uji F

Uji F adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji F yang digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 6**

**Hasil Uji F**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	15,150	4	3,788	51,537	0,000 <sup>b</sup>
	Residual	2,572	35	0,073		
	Total	17,722	39			

a. Dependent Variable: Pendapatan\_Asli\_Daerah

b. Predictors: (Constant), Pertumbuhan\_Ekonomi, Belanja\_Modal, Jumlah\_Wisatawan, Investasi

Sumber: IBM SPSS Statistics 22. Data diolah oleh penulis

Pada tabel 6 di atas menunjukkan nilai F hitung > F tabel sebesar  $51,537 > 2,63$ . Sehingga nilai F hitung > dari F tabel, maka hal ini menyimpulkan bahwa Belanja Modal, Investasi, Jumlah Wisatawan, dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen yakni Pendapatan Asli Daerah.

**Koefisien Determinasi**

Menurut Widarjono (2015: 17), koefisien determinasi menjelaskan bahwa uji koefisien determinasi untuk mengukur presentase total variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen di dalam garis regresi. Hasil uji koefisien determinasi dijelaskan pada tabel 7 sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,925 <sup>a</sup>	0,855	0,838	0,271

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan\_Ekonomi, Belanja\_Modal, Jumlah\_Wisatawan, Investasi

Sumber: IBM SPSS Statistics 22. Data diolah oleh penulis

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Hasil ini dijelaskan dalam uji t dimana t hitung belanja modal memiliki nilai positif sebesar 2,102 dengan tingkat signifikansi 0,043 dimana lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil uji t tersebut, maka belanja modal memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta.

Variabel belanja modal dalam penelitian ini menggunakan data laporan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah DKI Jakarta dalam pos belanja modal per-triwulan dari tahun 2007-2016. Berdasarkan data realisasi belanja modal DKI Jakarta selalu mengalami kenaikan yang terlihat pada triwulan IV setiap tahunnya. Kenaikan belanja modal ini ditandai dengan adanya peningkatan dalam belanja modal pengadaan dalam fasilitas-fasilitas umum untuk masyarakat seperti konstruksi jembatan penyebrangan, jalan fly over, jalan raya provinsi, jalan under pass, sarana umum terminal, hingga sarana pendidikan, dan lainnya dalam mensejahterakan masyarakat.

Hal ini didukung oleh teori pembangunan ekonomi dimana salah satu faktor yang dapat memengaruhi pembangunan ekonomi adalah pemerintah daerah harus memiliki sikap kreatif dan inovatif, karena sikap ini akan membuat pemerintah menemukan ide atau gagasan baru yang akan berdampak pada kemajuan

ekonomi daerah. Sehingga dalam pemerintah daerah meningkatkan fasilitas-fasilitas umum yang dapat mensejahterakan masyarakat maka masyarakat akan membayarkan retribusi dan pajak sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga hasil penelitian selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanis dan Saputra (2014) bahwa belanja modal dapat memengaruhi pendapatan asli daerah dengan adanya pembangunan infrastruktur dalam memenuhi pelayanan publik sehingga akan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi dan pajak.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Investasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Hasil ini dijelaskan dalam uji t dimana t hitung investasi memiliki nilai negatif sebesar -0,444 dengan tingkat signifikansi 0,660 dimana lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil uji t tersebut, maka investasi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta.

Proxy investasi yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan data penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Data PMA dan PMDN tersebut diperoleh melalui laporan realisasi investasi PMA dan PMDN dari tahun 2007-2016. Berdasarkan data laporan realisasi PMA dan PMDN Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2007 hingga 2009 nilai investasi

PMA dan PMDN mengalami naik turun. Hal ini dikarenakan nilai PMDN yang mengalami penurunan seperti yang dikatakan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bapak M Lutfi dilansir oleh detikfinance bahwa penurunan PMDN ini bukan didasarkan oleh perusahaan tutup atau dicabut melainkan karena ada sebagian investor yang memilih untuk menggunakan badan asing dengan mempertimbangkan pajak yang lebih rendah. Tingginya pajak perusahaan di Indonesia sebesar 30% menjadi pertimbangan investor karena cukup tinggi, sedangkan pajak untuk Singapura hanya 20% bahkan akan menurun menjadi 18%. Adapun faktor lain yang menyebabkan menurunnya PMDN adalah minimnya dana perbankan yang disalurkan ke sektor riil. Oleh karena itu investasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2013) yang mengatakan bahwa investasi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, hal ini dikarenakan bergantung pada kebijakan kepala daerah tersebut yang dilandasi oleh kemampuan keuangan daerah di kota Tasikmalaya, dimana tidak setiap tahun menyertakan modal berupa investasi kepada Bank Jabar Banten.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Jumlah Wisatawan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Hasil ini dijelaskan dalam uji t dimana t hitung investasi memiliki nilai positif sebesar 5,847 dengan tingkat signifikansi 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil uji t tersebut, maka jumlah wisatawan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pada penelitian ini variabel jumlah wisatawan menggunakan data jumlah

wisatawan dalam laporan pariwisata DKI Jakarta dalam pos jumlah wisatawan dari tahun 2007-2016. Berdasarkan data jumlah wisatawan selalu mengalami peningkatan per-triwulan disetiap tahunnya. Peningkatan ini ditandai dengan sektor pariwisata yang menarik wisatawan untuk berkunjung ke Provinsi DKI Jakarta. Hal ini juga dikatakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Bapak Arie Budhiman dilansir oleh kompas.com mengatakan bahwa jumlah wisatawan mengalami peningkatan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, hal ini dikarenakan berbagai sektor pariwisata menarik yang mendukung wisatawan untuk berkunjung ke Provinsi DKI Jakarta. Perolehan pendapatan asli daerah berasal dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Pajak hiburan diterima melalui tempat-tempat hiburan di Provinsi DKI Jakarta seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Taman Impian Jaya Ancol, Dunia Fantasi Ancol, Sea World, dan Monas yang menjadi tempat hiburan dominan yang dikunjungi oleh wisatawan. Hal ini menjadikan sektor pariwisata sebagai andalan Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, jumlah wisatawan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Suartini dan Utama (2013) yang mengatakan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, dikarenakan peningkatan sektor pariwisata dengan jumlah wisatawan yang memengaruhi pendapatan asli daerah melalui pajak hotel dan restoran.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Hasil ini dijelaskan dalam uji t dimana t hitung investasi memiliki

nilai positif sebesar 2,101 dengan tingkat signifikansi 0,043 dimana lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil uji t tersebut, maka pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pada penelitian ini variabel pertumbuhan ekonomi menggunakan data produk domestik regional bruto (PDRB) dalam laporan pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta dalam pos PDRB dari tahun 2007-2016. Berdasarkan data PDRB selalu mengalami peningkatan per-triwulan disetiap tahunnya. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Latif Adam, sebagai pengamat ekonomi Lembaga Ilmi Pengetahuan Indonesia (LIPI) dilansir oleh merdeka.com menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta semakin kuat sejak pulih dari krisis keuangan tahun 1997-1998. Terutama pada sektor jasa dimana tidak ada yang bisa mengalahkan Jakarta dengan fasilitas, kedekatan administrasi, dan keterhubungan terhadap pusat perekonomian dunia. Dalam lima tahun terakhir tingkat pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta mengalami peningkatan cukup signifikan. Dilihat dari PDRB,

DKI Jakarta menyumbang 15-17 persen dari PDB Indonesia, dimana ekonomi Jakarta didominasi oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan perdagangan hotel dan restoran. Sehingga menjadikan Jakarta sebagai penyumbang terbesar PDB Indonesia dibanding provinsi lainnya. Peningkatan PDRB tersebut akan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, hal ini dilihat dari PDRB melalui meningkatnya perdagangan hotel dan restoran dimana peningkatan ini akan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak dan retribusi.

► **Regresi Berganda**

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 8**  
**Hasil Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-6,340	3,940		-1,609	0,117
Belanja_Modal (X1)	0,045	0,021	0,145	2,102	0,043
Investasi (X2)	-0,058	0,130	-0,071	-0,444	0,660
Jumlah_Wisatawan (X3)	2,258	0,386	0,819	5,847	0,000
Pertumbuhan_Ekonomi (Y)	0,264	0,125	0,220	2,101	0,043

a. Dependent Variable: Pendapatan\_Asli\_Daerah

Sumber: IBM SPSS Statistics 22. Data diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel 8 maka persamaan regresi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar -6,340 memiliki arti apabila nilai variabel independen

penelitian nilainya 0, maka Pendapata Asli Daerah nilainya -6,340.

2. Koefisien pada variabel belanja modal (X1) sebesar 0,045 bernilai positif

yang berarti semakin tinggi belanja modal, maka akan semakin tinggi pula pendapatan asli daerah.

3. Koefisien pada variabel investasi (X2) sebesar -0,058 bernilai negatif yang berarti semakin tinggi investasi, maka tidak berarti akan semakin tinggi pula pendapatan asli daerah.
4. Koefisien pada variabel jumlah wisatawan (X3) sebesar 2,258 bernilai positif yang berarti semakin tinggi jumlah wisatawan, maka akan semakin tinggi pula pendapatan asli daerah.
5. Koefisien pada variabel pertumbuhan ekonomi (X4) sebesar 0,264 bernilai positif yang berarti semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka akan semakin tinggi pula pendapatan asli daerah.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Penelitian ini dilakukan untuk mengathui pengaruh Belanja Modal, Investasi, Jumlah Wisatawan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2007-2016 per-triwulannya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta, dikarenakan adanya peningkatan dalam belanja modal pengadaan dalam fasilitas-fasilitas umum dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga masyarakat akan membayarkan retribusi dan pajak yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta. Dan sesuai dengan terori PSAP 07, Pada akuntansi berbasis akrual, belanja

modal dikategorikan sebagai aset. Aset tetap diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yakni tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, da jaringan, aset tetap lainnya. Dimana aset tetap ini termasuk dalam pendapatan daerah pada pos lain-lain PAD yang sah. Sehingga dengan meningkatkan pelayanan pada masyarakat maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. Hasil penelitian menyatakan bahwa Investasi tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta, dikarenakan tingginya pajak perusahaan di PMDN sebesar 30% menjadi pertimbangan investor karena cukup tinggi, sedangkan pajak untuk PMA hanya 20% bahkan akan menurun menjadi 18%. Dalam SAP juga dijelaskan bahwa, investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. Investasi pemerintah dalam aset tetap tidak sama dengan investasi yang dilakukan oleh entitas bisnis, dimana manfaat ekonomi dari investasi pemerinta dalam aset tetap tidak akan langsung dinikmati pemerintah dalam bentuk hasil imbal investasi namun kadang-kadang dapat berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan potensi penerimaan pajak dimasa yang akan datang.
3. Hasil penelitian menyatakan bahwa Jumlah Wisatawan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta, dikarenakan berbagai sektor pariwisata menarik yang mendukung wisatawan untuk berkunjung ke Provinsi DKI Jakarta. Perolehan pendapatan asli daerah pun dapat mneningkat melalui pajak hotel, pajak restoran, dan pajak restoran.

Spillane (1994) menyatakan bahwa perkembangan sektor pariwisata juga akan membantu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, karena sektor pariwisata dapat menggerakkan sektor barang dan jasa. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan kegiatan wisatanya tentu wisatawan akan membutuhkan barang dan jasa yang dibutuhkan selama berwisata sehingga akan meningkatkan pajak dalam sektor perhotelan, hiburan, serta restoran.

4. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta, dikarenakan produk domestik regional bruto selalu mengalami peningkatan karena hampir semua sektor tumbuh positif dengan pertumbuhan tertinggi diperoleh pada sektor pengangkutan-komunikasi sebesar 4,3%, selanjutnya sektor perdagangan-hotel-restoran sebesar 2,5%, dan jasa-jasa sebesar 2,4%, sektor konstruksi sebesar 1,9%, sektor keuangan-real estat-jasa perusahaan sebesar 1,2%, dan sektor listrik-gas-air bersih sebesar 1,1%. Peningkatan PDRB tersebut akan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi. Saragih (2003) menyatakan bahwa setiap terjadi suatu perubahan dalam kondisi perekonomian maka akan memberikan dampak perubahan pada Pendapatan Asli daerah (PAD) pula. Dimana hal ini juga berkaitan dengan Spillane (1994) yang menyatakan bahwa perkembangan sektor pariwisata juga akan membantu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, karena sektor pariwisata dapat menggerakkan sektor barang dan jasa. Dengan peningkatan sektor barang dan jasa akan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak

jasa-jasa, pajak listrik, pajak air bersih, pajak perdagangan hotel maupun restoran.

### Implikasi

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diketahui bahwa variabel yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah Belanja Modal, Jumlah Wisatawan, dan Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan yang tidak memengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah Investasi. Maka implikasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menyatakan bahwa investasi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengkaji kembali terkait dengan besarnya pajak yang dikenakan kepada perusahaan Indonesia yang mana hal ini untuk meningkatkan kembali minat investor dalam negeri dalam menanamkan modalnya di Provinsi DKI Jakarta, dimana PMDN yang diberikan oleh investor dalam negeri untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Untuk belanja modal, jumlah wisatawan, dan pertumbuhan ekonomi yang memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah, tentu pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mempertahankan dan meningkatkan kembali hal-hal yang menjadi faktor meningkatnya variabel tersebut dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Pada belanja modal, pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mempertahankan dan meningkatkan fasilitas-fasilitas yang dapat membangun ekonomi dan mensejahterakan masyarakat sehingga masyarakat akan rela membayar pajak dan retribusi atas kenyamanan dan kepuasan atas fasilitas yang diberikan.

- Untuk jumlah wisatawan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus terus meningkatkan sektor pariwisata yang akan menarik datangnya wisatawan ke Provinsi DKI Jakarta sehingga PAD akan meningkat melalui pajak hotel, restoran, maupun hiburan. Serta pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mempertahankan dan meningkatkan produk dan jasa dalam meningkatkan PAD seperti perdagangan hotel dan restoran.

### Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka berikut ini saran peneliti antara lain sebagai berikut:

- Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan empat variabel, maka untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen lain seperti jumlah penduduk, inflasi, tenaga kerja, dan lainnya yang dapat memengaruhi pendapatan asli daerah sehingga akan menambah penelitian baru.
- Peneliti dalam penelitian ini hanya melakukan penelitian di Provinsi DKI Jakarta, maka untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas populasi penelitian seperti 10 kota besar di Indonesia atau seluruh provinsi di Indonesia sehingga akan mengetahui lebih luas dan perbedaan PAD di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

Badruddin, Rudy. 2017. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Desmawati, Ayu, Zamzami, dan Zulgani. 2015. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi*.

### *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*

Darwanis, dan Ryanda Saputra. 2014. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Aceh)*

Fauziah I, Achmad Husaini, dan M.Shobaruddin. 2014. *Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Malang)*. *Jurnal Perpajakan*

Ghozali. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Hasanah, Nuramalia, dan Achmad Fauzi. 2016. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: In Media

Ifrizal, Darwanis, dan Sulaiman. 2014. *Pengaruh Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Serta Dampaknya Pada Kemampuan Daerah Membiayai Belanja Pegawai (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Aceh)*. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*

Jaya, Gde Bhaskara Perwira, dan A.A Bagus Putu Widanta. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar*. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*

Kaho, Josef Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Machmud, Amir. 2016. *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Erlangga

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI

Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra, Maulidah Rahmawati. 2012.

- Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat
- Novita, Anita Ika, Suharno, dan Bambang Widarno. 2016. Pengaruh Investasi, Produk Domestik Regional Bruto, dan Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*
- Pamungkas, Ifan Restu Bagus. 2013. Analisis Pengaruh PMDN, PMA, dan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pati Tahun 1982-2011. *Economics Development Analysis Journal*
- Purwanti, Novi Dwi, dan Retno Mustika Dewi. 2014. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006-2013. *Jurnal Ilmiah Tahun 2014*
- Ririn T, Rida Prihatni, dan Yunika Murdayanti. 2014. Pengaruh Belanja Modal, Investasi, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*
- Ristani, Ni Wayan, Nyoman Ari Surya Darmawan, dan Anantawikrama. 2015. Pengaruh Alokasi Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Bangli Periode 2009-2013. *E-Journal SI Akuntansi Pendidikan Ganesha*
- Sari, Putu Lia Perdana. 2013. Analisis Variabel-Variabel Yang Memengaruhi Pendaptan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*
- Siregar, Baldric. 2017. Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua). Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Sjafrizal. 2016. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta: Rajawali Pers
- Suartini, Ni Nyoman, dan Made Suyana Utama. 2013. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*
- Sugiyono. 2013. Metode Bisnis Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta
- Tendean, Jesica Carolina, Sutomo Wim Palar, dan Krest Donald Tolosang. 2014. Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado Melalui Pajak Hotel Sebagai Intervening Variabel. *E-Jornal Universitas Sam Ratulangi*
- Utami, Ayu Mita. 2013. Pengaruh Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Universitas Siliwangi Tasikmalaya*
- Widarjono, Agus. 2015. Analisis Multivariat Terapan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Widyaningsih, Putu, dan Made Kembar Sri Budhi. 2014. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pendapatan Asli Daerah. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*
- Wijaya, I Gusti Agung Satrya, dan I Ketut Djayastra. 2014. Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Jumlah Tingkat Hunian kamar hotel, dan jumlah kamar hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Badung, gianyar, tabanan, dan kota Denpasar tahun 2001-2010. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*
- Wulandari, Pande Paramitha, dan Anak Agung Ketut Ayuningsari. 2014. Analisis Variabel-Variabel Yang Memengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*
- Yani, Ahmad. 2013. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diakses pada 16 Maret 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, diakses pada 16 Maret 2018

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), diakses pada 14 Maret 2018

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, diakses pada 17 Maret 2018

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diakses pada 17 Maret 2018

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, diakses pada 12 Maret 2018

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diakses pada 11 Maret 2018

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, diakses pada 7 Maret 2018

### **Website**

Finance, detik. 20 September 2008. Investasi

PMDN Anjlok 59%, PMA Lampau Target. Jakarta: Financedetik.com (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1009369/investasi-pmdn-anjlok-59-pma-lampau-target>, diakses pada 30 Juli 2018)

Kompas. 23 Desember 2016. Investasi Asing di Sektor Perhotelan Tembus 333 Juta Dollar AS. Jakarta: Kompas.com (<http://properti.kompas.com/read/2016/12/23/103740021/investasi.asing.di.sektor.perhotelan.tembus.333.juta.dollar.as>, diakses pada 04 Juni 2018)

Kompas. 08 Januari 2014. PAD Pariwisata DKI Jakarta Meningkat. Jakarta: Kompas.com (<http://travel.kompas.com/read/2014/01/08/1049240/PAD.Pariwisata.DKI.Jakarta.Meningkat>, diakses pada 04 Juni 2018)

Kompas. 13 Januari 2011. DKI Andalkan Sektor Pariwisata. Jakarta: Kompas.com (<https://megapolitan.kompas.com/read/2011/01/13/20133790/dki.andalkan.sektor.pariwisata>, diakses pada 30 Juli 2018)

Merdeka. 12 Juli 2012. DKI Jakarta, Penyumbang Terbesar Ekonomi Nasional. Jakarta: Merdeka.com (<https://www.merdeka.com/uang/dki-jakarta-penyumbang-terbesar-ekonomi-nasional.html>, diakses pada 30 Juli 2018)